

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Upaya Hukum bagi Pihak Ketiga (Pihak yang tidak terlibat langsung dalam APPJB) yang dirugikan atas terbitnya APPJB tersebut dan bentuk pertanggungjawaban bagi Notaris secara perdata, Pidana dan Administrasi atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (APPJB) Tanah yang dibuatnya. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli yang diterbitkan oleh notaris menimbulkan kerugian bagi dirinya adalah melayangkan somasi, melakukan Gugatan Perbuatan melawan hukum, melaporkan dugaan tindak pidana serta melakukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Notaris atas penerbitan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli yang merugikan pihak ketiga yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan mengganti kerugian yang dialami Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan pertanggungjawaban Pidana yaitu menjalani hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP serta pertanggungjawaban secara etik sesuai Pasal 85 dengan mendapat sanksi administrasi.

Kata kunci: Tanggungjawab, Notaris, Sanksi Perdata, Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi

ABSTRACT

This research examines Legal Remedies for Third Parties (Parties not directly involved in APPJB) who were harmed by the issuance of the APPJB and the form of liability for Notaries in civil, criminal and administrative terms for the Deed of Land Sale and Purchase Agreement (APPJB) made. This type of legal research is a type of normative legal research. The results of this study indicate that legal remedies that can be taken by a third party if the deed of binding sale and purchase agreement issued by a notary causes harm to him is to send a subpoena, carry out an unlawful act lawsuit, report an alleged criminal act and make a complaint to the Regional Supervisory Council. The form of liability that can be charged to a Notary for the issuance of the Deed of Sale and Purchase Agreement which is detrimental to a third party is civil liability by compensating for losses suffered by a third party in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code and Criminal liability, namely serving a criminal sentence in accordance with the criminal provisions in Article 263 paragraph (1) and (2) or 264 or 266 of the Criminal Code and ethically responsible according to Article 85 by receiving administrative sanctions.

Keywords: Responsibility, Notary, Civil Sanction, Criminal Sanction, Administration Sanction.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
BAB II	
2.1 Teori Kepastian Hukum	18
2.2 Teori Kewenangan	20
2.2.1 Teori Kewenangan APPJB Notaris	22
2.3 Teori Perjanjian.....	25
2.4 Teori TanggungJawab.....	27
2.4.1. Teori Tanggung Jawab Notaris	30
BAB III	
3.1 Upaya Hukum Pihak Ketiga atas Kerugian yang Timbul Akibat diterbitkannya Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Oleh Notaris	36
3.2 Pertanggungjawaban Notaris atas Kerugian yang Timbul Akibat Terbitnya Akta Perjanjian Jual Beli Tanah.....	47
1. Tanggungjawab secara Perdata	48
2. Tanggungjawab secara Pidana	57
3. Tanggungjawab secara Kode Etik.....	63
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	76
2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78